

**REPRESENTASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PEMBERITAAN KASUS AMBALAT
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA:
SEBUAH KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS**

disampaikan dalam Forum Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia

(SKIM) XI

Bandung, 10-12 Nopember 2009



Oleh:

ROSARIA MITA AMALIA, S.S., S.IP., M.Hum.

**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

2009

**REPRESENTASI PEMERINTAH INDONESIA DALAM
PEMBERITAAN KASUS AMBALAT
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA:
SEBUAH KAJIAN ANALISIS WACANA KRITIS**

Rosaria Mita Amalia, S.S., S.IP., M.Hum.

Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran

Abstract

The title of this paper is “The Indonesian Government Representation on Ambalat case between Indonesia and Malaysia: A Critical Discourse Analysis Study”.

News on Ambalat block has been headlines of mass media in both countries. As an informative instrument, mass media is an arena for political, cultural and individual struggle. Mass media representation can be analyzed by using Critical Discourse Analysis, or CDA. CDA is used to analyze how the ‘power’ is presented through the discourse. It decomposes the techniques of the language usage in relation to social and politics when the process of the production of language occurred. This research paper employs Teun A van Dijk model that explains stages in discourse analysis. Van Dijk’s three levels of social order, that is macro-level analysis, and micro-level analysis, CDA is used to bridge between the two levels of social order by using meso-level analysis.

Macro-level analysis includes social and political contexts. Van Dijk divides micro-level analysis into three parts, macro structure, superstructure and micro structure. Macro structure includes global meanings, which is a theme or a topic, superstructure includes text frame, and micro structure being a local coherence, a choice of words, sentence and language style.

This paper provides a comprehensive understanding of Indonesian representation on Ambalat case between Indonesia and Malaysia as it is reflected on news by “Kompas online”.

Key words: Representative, Critical Discourse Analysis

A. Tentang Ambalat

Ambalat adalah sebuah blok lautan yang terletak di Laut Sulawesi yang saat ini menjadi perebutan antara Indonesia dan Malaysia. Luasnya kira-kira 15,235 kilometer persegi. Blok ini terletak di perairan Propinsi Kalimantan Timur dan bagian tenggara dari Negara bagian Sabah. Malaysia menamai Blok Ambalat ini dengan nama Blok ND6 dan bagian timur dari Blok Ambalat dengan nama Blok ND7. Blok Ambalat ini diperkirakan mengandung 62 juta barrel minyak bumi dan 348 juta kubik gas alam (<http://www.utusan.com>.) Sementara menurut seorang pakar geologi Indonesia, Andang Bachtiar, kandungan minyak bumi yang terdapat di blok Ambalat mencapai 764 juta barrel dan 1, 4 triliun kubik gas alam. Jumlah ini hanya terdapat di satu titik dari blok Ambalat, sementara itu blok Ambalat memiliki 9 titik. Diperkirakan kandungan minyak dan gas ini dapat dieksploitasi dalam kurun waktu 30 tahun (<http://www.temppointeractive.com>). Dapat dibayangkan betapa besar kandungan sumber daya mineral yang terdapat di tempat ini. Secara ekonomi, tempat ini sangatlah menjanjikan jika dikelola dengan serius .

B. Konflik Indonesia-Malaysia perihal blok Ambalat

Perselisihan mengenai kepemilikan blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia telah terjadi pada tahun 1960-an dan kondisi ini semakin diperburuk dengan diterbitkannya peta Malaysia pada tahun 1979 yang secara sepihak memasukkan blok Ambalat ke dalam wilayah Negara Malaysia. Peta Malaysia ini tidak disetujui oleh beberapa Negara, diantaranya Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand dan Vietnam karena dianggap telah mengambil sebagian dari wilayah mereka. Peta tersebut dianggap Indonesia menarik garis batas kontinen melebihi ketentuan hukum internasional sehingga masuk ke wilayah Indonesia seluas sekitar 8.000 km², juga ke wilayah negara sesama ASEAN lainnya, yaitu Filipina, dengan luas yang lebih besar lagi, yaitu sekitar 17.000 km² (<http://en.wikipedia.org/wiki/Ambalat>).

Seperti yang telah disebutkan di atas, kawasan yang menjadi perselisihan antara Indonesia dan Malaysia itu dikenal di Malaysia sebagai ND6 dan ND7, sementara Indonesia memberikan nama untuk lokasi serupa masing-masing sebagai Blok Ambalat dan Blok Ambalat Timur. Akar persoalan kasus sengketa Ambalat ini terjadi akibat tidak adanya kesepakatan garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi, tempat dimana terletak blok Ambalat tersebut. Untuk lebih memperjelas letak blok Ambalat, penulis sertakan peta blok Ambalat.



(<http://images.google.co.id>)

Malaysia menolak argumentasi Indonesia yang mengatakan bahwa Blok Ambalat di Laut Sulawesi merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pihak Malaysia yang diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, Syed Hamid Albar, mengatakan bahwa Blok ND6 (dahulu dikenal dengan sebutan Blok Y) dan ND7 (dahulu dikenal dengan sebutan Blok Z) yang terletak di Laut Sulawesi masih berada di dalam batas kontinen Malaysia seperti yang tercakup dalam Peta Wilayah Perairan dan Batas Kontinen Malaysia tahun 1979. Karena Malaysia memiliki hak berdaulat dan hak hukum untuk melakukan eksplorasi dan memanfaatkan (eksploitasi) sumber daya alam di dalam batas kontinennya sesuai dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982, maka Malaysia sudah memberikan ijin kontrak untuk pengelolaan kedua blok tersebut kepada Shell dan Petronas Carigall.

Malaysia telah menyampaikan nota protes kepada Indonesia yang berisi keberatan negeri jiran itu atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi oleh Indonesia di Ambalat dan Ambalat Timur yang dianggapnya sebagai `melanggar batas kontinen Malaysia`. Pernyataan Malaysia itu bersebrangan dengan posisi Indonesia yang menyatakan bahwa menurut hukum laut internasional, Ambalat di Laut Sulawesi merupakan bagian dari NKRI sehingga konsesi minyak yang

diberikan Malaysia kepada Shell telah melanggar kedaulatan Indonesia. Indonesia melalui Departemen Luar Negeri sudah beberapa kali menyampaikan nota protes untuk berbagai pelanggaran wilayah kedaulatan oleh Malaysia. Menurut Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Deplu-RI, Arif Havas Oegroseno, Malaysia tidak mengindahkan bentuk protes dari Indonesia dengan alasan blok tersebut berada di wilayah kedaulatan Malaysia (<http://www.antara.co.id>)

Sengketa mengenai perairan bukanlah baru pertama kali ini terjadi antara kedua Negara. Sebelumnya Indonesia dan Malaysia juga pernah memperebutkan pulau Sipadan dan Ligitan. Namun kedua pulau ini akhirnya jatuh ke tangan Malaysia setelah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice/ICJ*) pada tahun 2002 memutuskan bahwa kedua pulau ini menjadi milik Malaysia. Pada tahun 2005, ketegangan di perbatasan Malaysia dan Indonesia meningkat. Pesawat pengintai udara Malaysia jenis Super King telah dua kali melintasi wilayah udara RI di sekitar perairan Tarakan, Kalimantan Timur. Pesawat pengintai itu bahkan terbang melintas di atas kapal perang TNI Angkatan Laut yang tengah patroli di perbatasan RI - Malaysia, khususnya di sekitar Ambalat (<http://www.suarapembaruan.com>)

Berkaitan dengan kondisi itu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengatakan, persoalan atas perbatasan Indonesia-Malaysia di kawasan Kalimantan bagian utara itu akan diselesaikan dengan solusi terbaik. Presiden tidak menginginkan langkah ekstrem dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Dan kedua Negara sepakat untuk menempuh jalur perundingan dalam penyelesaian masalah ini. Dan sampai saat ini perundingan masih terus berlangsung.

Perselisihan mengenai Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merupakan issue yang sangat menarik bagi media massa kedua negara. Sebagai media informasi, media massa merupakan arena perjuangan politik, budaya, maupun personal. Malaysia mengatakan bahwa pemberitaan terhadap kasus Ambalat ini oleh media massa di Indonesia sudah sangat berlebihan, sehingga menjadikan hubungan kedua Negara menjadi panas. Mereka membantah tuduhan pihak Indonesia yang terdapat di media massa. Salah satu media massa di Indonesia menulis bahwa pada tahun ini saja (2009) kapal perang Malaysia telah memasuki wilayah Indonesia sebanyak 9 kali. Sementara Malaysia membantah pernyataan ini. Mereka berharap bahwa perselisihan ini hendaknya diselesaikan oleh kedua Negara dengan perundingan, bukan dengan perang di media massa. Dalam kasus ini, media massa memegang peranan penting dalam pembentukan opini terhadap pembaca dari kedua negara, mengingat kasus ini masih dalam tahap perundingan. (<http://www.utusan.com>.)

Tulisan ini akan menampilkan representasi pemerintah Indonesia di dalam pemberitaan mengenai kasus Ambalat yang ditampilkan oleh *Kompas.com*. Artikel yang akan dibahas untuk menunjukkan representasi tersebut berjudul "Presiden Izinkan ENI Beroperasi di Ambalat" (20 Oktober 2008). Koran Kompas dipilih karena Koran ini memiliki citra nasionalis jika dibandingkan dengan koran nasional lainnya. Kompas merupakan harian nasional yang terbit sejak 28 Juni 1965, dengan mengusung pesan sebagai "amanat hati nurani rakyat". Sebagai

koran yang bersifat nasionalis, berita-berita yang disajikan ditulis dalam bahasa, yang penulis rasakan, cukup sopan, terutama dalam isu-isu yang menyangkut kepentingan Indonesia. Dalam penulisan artikel-artikelnya, sangat terlihat bahwa Kompas berusaha untuk turut serta menjaga kestabilan Negara dengan menurunkan tulisan-tulisan dengan bahasa yang halus dan sopan. Mengingat isu mengenai Ambalat ini merupakan isu sensitif bagi Indonesia dan Malaysia karena menyangkut kedaulatan dari masing-masing negara, penulis ingin melihat bagaimana pemerintah Indonesia ditampilkan dalam pemberitaan mengenai Ambalat di dalam *Kompas.com*. Pilihan *Kompas.com* yang sifatnya *online* pun beralasan, karena pemuktahiran berita pada media *online* lebih cepat dibandingkan dengan media cetak sehingga pembaca selalu mendapatkan berita terbaru tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Para pembaca media *online* dapat langsung memberikan pendapat dan komentar terhadap berita-berita tersebut. Sehingga dapat terlihat efek langsung dari suatu pemberitaan.

C. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis atau *Critical Discourse Analysis* (CDA) merupakan analisis yang terfokus pada bahasa dan wacana yang dimulai dengan munculnya ‘critical linguistic’ di Inggris dan Australia pada akhir tahun 1970-an. Analisis dalam CDA meliputi *pragmatics, conversation analysis, narative analysis, rhetorics, sociolinguistics, ethnography, dan media analysis*.

CDA merupakan kajian linguistik kritis, yang dalam ensiklopedia linguistik (Malmkjaer, 2002: 102) adalah “... a linguistics that seeks to understand the relationships between ideas and their social conditions of possible existence.” Artinya, CDA, dalam ruang lingkup linguistik kritis, mengungkap hubungan antara ide yang tercantum dalam teks dan konteks sosialnya pada saat itu. Eriyanto mengatakan bahwa dalam kajian ilmu linguistik, analisis wacana kritis dipakai untuk membongkar kuasa yang ada di setiap proses bahasa: batasan-batasan apa diperkenankan menjadi wacana, perspektif apa yang musti dipakai, topik apa yang dibicarakan (Eriyanto, 2001: 6).

Karena CDA berfokus pada masalah sosial, CDA selalu membahas hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu sosial, dengan harapan analisis wacana dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu tersebut. Untuk mewujudkan tujuan sosiopolitiknya itu, CDA harus melibatkan atau menjabarkan teori, deskripsi, metode, dan kajian empiris sebagai satu fungsi yang berhubungan. (van Dijk, 1993: 252) Dengan dibutuhkannya suatu kesatuan fungsi, maka kajian CDA bersifat multidisiplin.

Prinsip utama CDA menurut Fairclough dan Wodak yang dirangkum oleh van Dijk (2001: 353) antara lain:

1. CDA membahas masalah-masalah sosial
2. Hubungan kekuasaan adalah diskursif
3. Wacana merupakan masyarakat dan budaya
4. Wacana melakukan kajian ideologis
5. Wacana bersifat historis

6. Hubungan antara teks dan masyarakat difasilitasi
7. Analisis wacana bersifat interpretatif dan penjelasan
8. Wacana merupakan bentuk tindakan sosial

Untuk melakukan analisis wacana kritis, terdapat beberapa bentuk model analisis yang dikembangkan oleh beberapa ahli. Menurut Eriyanto (2001: 19), beberapa tokoh penting yang mengembangkan model analisis wacana kritis antara lain Roger Fowler, Theo van Leeuwen, Sara Mills, Teun A. van Dijk, dan Norman Fairclough.

D. Analisis Wacana Kritis Teun A. van Dijk

Menurut Teun A. van Dijk, analisis wacana kritis atau dalam bahasa Inggris disebut *Critical Discourse Analysis* (CDA) adalah "... a type of discourse analytical research that primarily studies the way social power abuse, dominance, and inequality are enacted, reproduced, and resisted by text and talk in the social and political context." (2001: 352) Dari definisi tersebut, van Dijk menekankan bahwa CDA merupakan analisis wacana untuk mengungkapkan praktek-praktek sosial yang tidak terlihat secara eksplisit namun memiliki pengaruh dalam tatanan masyarakat, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, dominasi, dan ketidaksetaraan yang terungkap dalam teknik-teknik tertentu dalam teks atau percakapan, dan didukung oleh konteks sosial dan politik. Itu artinya, CDA berusaha membongkar teknik-teknik penggunaan bahasa dikaitkan dengan faktor sosial dan politik saat terjadinya proses produksi bahasa tersebut. Dalam pandangan van Dijk, analisis wacana kritis meneliti bentuk kendali atas kekuasaan melalui produksi bahasa, dan didukung oleh konteks sosial dan politik. Secara umum, analisis wacana kritis berfungsi sebagai pembongkar teknik-teknik dan konteks suatu wacana.

Teun van Dijk menggunakan tiga pendekatan dalam analisis wacana kritis, yakni tingkat mikro, tingkat meso, dan tingkat makro. Pada tingkat mikro, aspek yang dianalisis adalah penggunaan bahasa, wacana, interaksi verbal, dan komunikasi. Pada tingkat meso, dipelajari proses produksi berita yang melibatkan kognisi individu wartawan. Sementara itu aspek yang dianalisis pada tingkat makro adalah kekuasaan, dominasi dan ketidaksetaraan antara kelompok sosial. CDA secara teoretis bertugas menutup jarak antara pendekatan mikro dan makro tersebut agar dapat mencapai keutuhan analisis. (Alexander, et al, Knorr-Cetina & Cicourel, dalam van Dijk, 2001:354). Tahapan makro adalah analisis sosial yang melibatkan konteks sosial maupun politik. Sementara itu pada tahapan mikro, van Dijk membaginya kembali menjadi tiga bagian, yaitu struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. Struktur makro mencakup makna global yang berupa tema atau topik, superstruktur mencakup kerangka teks, dan struktur mikro merupakan koherensi lokal yang berupa pilihan kata, kalimat dan gaya bahasa (Eriyanto, 2001: 227).

E. Representasi Pemerintah Indonesia dalam Pemberitaan Kasus Ambalat:

- **Peran Media Massa**

Pemberitaan mengenai blok Ambalat ramai ditulis oleh media massa Indonesia dan Malaysia. Kemudahan untuk mengakses media menjadikan media bukan hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi juga sebagai arena perjuangan politik, budaya, maupun kepentingan personal. Kemudahan akses media massa menyebabkan media massa berpotensi kuat dalam mengontrol pikiran masyarakat.

Teun A. van Dijk menyebutkan(1995b:2): *“Media power is generally symbolic and persuasive, in the sense that the media primarily have the potential to control to some extent the minds of readers or viewers, but not directly their actions”*. Dalam kasus ini, media massa kedua Negara memegang peranan penting dalam pembentukan opini terhadap pembacanya.

- **Representasi**

Istilah representasi menunjuk pada bagaimana seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan sebagaimana mestinya, apakah diutamakan, dimarginalkan, atau dinetralkan (Eriyanto, 2001: 113). Penggunaan representasi dapat menggunakan berbagai cara. Mulai dari teks seperti pilihan kata, relasi antarkalimat, atau bantuan foto dan referensi gambar yang ditampilkan sebagai penambahan dan penguatan visual.

Hal utama yang menunjukkan representasi adalah penggunaan bahasa. Eriyanto mengatakan:

“Representasi sekaligus misrepresentasi tersebut adalah peristiwa kebahasaan. Hal ini lebih membuktikan bahwa penggunaan bahasa seperti pemilihan diksi dapat menimbulkan gambaran tertentu terhadap peristiwa yang diproduksi oleh seorang wartawan atau media. Oleh karena itu hal yang perlu dikritisi di sini adalah tentang penggunaan bahasa yang ditampilkan media. Proses ini mau tidak mau sangat berhubungan dengan pemakaian bahasa dalam menuliskan realitas untuk dibaca oleh khayalak.” (Eriyanto, 2001: 116).

Representasi dalam penelitian ini merujuk pada gambaran atau tampilan Pemerintah Indonesia dalam pemberitaan kasus Ambalat, sehingga menimbulkan citra yang sifatnya positif atau negatif.

- **Analisis:**

- a. Tataran Makro**

Tataran makro mencakup unsur kuasa, dominasi, yang didukung oleh kemudahan akses untuk kendali atas satu atau lebih jenis wacana dan bahkan kendali atas pikiran pembaca atau pendengar wacana tersebut. (van Dijk, 2001: 354-355) Untuk menghubungkan objektif dari tataran ini dengan analisis wacana, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah akses yang dimiliki partisipan terhadap wacana tersebut, baik dari segi konteks maupun struktur teks.

Van Dijk menjelaskan (1996: 84) yang dimaksud dengan kekuasaan dalam wacana adalah kekuasaan sosial, yaitu: "... *control exercised by one group or organisation (or its 'members) over the actions and/or the minds of (the members of) another group, ...* ." Sementara itu, dikatakan pula bahwa kekuasaan itu didasarkan atas kemudahan akses terhadap sumber-sumber penting seperti kekayaan, posisi, status, pengetahuan, dan sebagainya. (van Dijk, 1993: 254) Jadi, kekuasaan didukung oleh akses yang dimiliki individu dari/atau suatu kelompok sosial dapat digunakan sebagai kendali atas wacana publik.

Kendali wacana dapat dilihat dari bentuk akses atau kendali atas konteks wacana, seperti domain, tindakan sosial, seting, keadaan, dan peran partisipan. (van Dijk, 2001: 356) Sedangkan kendali atas teks dilihat dari apakah partisipan memiliki kuasa untuk mengendalikan genre, tindak ujar, sampai strategi bahasa yang harus digunakannya.

Dalam artikel berjudul "Presiden Izinkan ENI Beroperasi di Ambalat" tertulis bahwa Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah mengizinkan perusahaan minyak dan gas asal Itali PT ENI E&P untuk mengembangkan proyek migas di Ambalat. PT ENI E&P adalah perusahaan minyak dan gas yang berbasis di Italia. Perusahaan ini telah melakukan eksploitasi penambangan di hampir seluruh wilayah di dunia seperti Afrika Utara, Afrika Barat, Teluk Meksiko, Asia Tenggara, Amerika, Australia serta beberapa kawasan di Timur Tengah. Dalam menjalankan operasinya, perusahaan ini mempunyai komitmen untuk memberikan perhatian penuh terhadap lingkungan. Bisa dikatakan perusahaan ini berbasis lingkungan dalam menjalankan operasi penambangan. Mungkin ini yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Indonesia saat menggandeng PT ENI E&P sebagai mitra dalam pengembangan kawasan Ambalat. Izin tersebut diberikan karena pemerintah merasa blok tersebut merupakan bagian wilayah kedaulatan NKRI. Artikel ini menunjukkan bahwa pimpinan tertinggi RI, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhyono menunjukkan sikap untuk terus memperjuangkan status blok Ambalat yang telah diklaim Malaysia sebagai bagian dari wilayahnya. Sikap ini ditandai dengan penunjukkan PT ENI sebagai mitra dalam mengelola sumber daya alam yang terdapat di wilayah ini.

Sebagai koran nasional yang sudah dikenal, *Kompas* memiliki kemudahan akses untuk mendapatkan informasi. Untuk artikel tersebut *Kompas* langsung mendapatkan berita tersebut dengan hadir dalam Konferensi Pers yang diadakan

oleh Istana Kepresidenan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro yang turut hadir mendampingi presiden dalam pertemuan dengan pihak PT ENI. Jika melihat lebih lanjut, artikel ini berdomain politik, karena menyangkut sikap dan kebijakan Indonesia, dalam hal ini terwakili oleh Presiden RI yang merupakan pimpinan tertinggi RI, terhadap kasus Ambalat. Walaupun kasus ini masih dalam tahap perundingan, namun karena ada keyakinan yang besar disertai bukti-bukti otentik bahwa blok Ambalat merupakan bagian dari kedaulatan NKRI, maka presiden mengambil sikap dengan memberikan izin kepada PT ENI untuk mengelola minyak dan gas yang terdapat dalam blok Ambalat.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini pihak Istana Merdeka memiliki akses untuk merencanakan keseluruhan pertemuan antara Presiden SBY dengan PT ENI E&P yang diwakili oleh Paolo Scaroni (CEO ENI), Stefano Lucchini (humas ENI), dan Roberto Lorato (Direktur Manajer ENI di Indonesia). Pembicaraan dalam pertemuan itupun dihadiri oleh Dubes Italia untuk Indonesia, Roberto Palmieri. Melihat tempat, topik dan orang-orang yang menghadiri pertemuan itu, dipastikan pertemuan tersebut bersifat formal karena menyangkut kerjasama Pemerintah Indonesia, tidak hanya dengan PT ENI, namun juga memiliki keterkaitan dengan pemerintah Italia di bidang pengelolaan sumber daya minyak bumi dan gas alam. Pertemuan ini tentunya sudah diagendakan atau direncanakan sebelumnya, sehingga semua pihak yang berkepentingan dapat hadir. Pemerintah Indonesiapun memiliki akses yang besar untuk mengatur jalannya konperensi pers dan berita yang akan diberikan kepada para wartawan. Terlebih berita ini mengenai pengelolaan blok Ambalat yang masih disengketakan oleh Indonesia dan Malaysia. Wartawan disini merupakan audiens dan mewakili media, kehadiran mereka tentunya sudah diseleksi terlebih dahulu, dari media mana mereka berasal. Karena konferensi ini bersifat resmi, maka jenis komunikasi yang digunakan pun diarahkan untuk bersifat formal. Jadi pemerintah Indonesia punya kendali akses dan kuasa yang besar terhadap pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah mengenai kasus Ambalat dalam artikel tersebut.

b. Tataran Mikro:

Jika suatu kelompok memiliki kuasa, maka hal tersebut akan tergambarkan dalam struktur wacana yang mereka sampaikan melalui teks. (van Dijk, 1993: 299) Dengan melihat wacana dari tataran ini, formasi model situasi yang diinginkan dapat dilihat dari penggunaan strategi-strategi tertentu dalam wacana. Tatanan mikro ini merupakan analisis untuk membongkar struktur wacana. Model analisis van Dijk terbagi dalam beberapa struktur yang detail. Menurutnya, teks terbagi atas dua koherensi dasar, yaitu koherensi global dan lokal. Koherensi global mencakup topik atau struktur makro dan skema atau suprastruktur wacana. Sedangkan koherensi lokal mencakup level makna lokal teks, stilistik, struktur kalimat atau sintaksis, dan retorik.

- **Struktur Makro: Topik**

Struktur makro membentuk informasi terpenting dalam wacana, dan memegang peranan kognitif yang penting dalam produksi dan pemahaman wacana. (van Dijk, 1993: 117) Struktur makro ini berupa topik yang mendefinisikan makna global yang menjadi kesatuan teks.

Struktur makro adalah makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema yang diangkat oleh suatu teks. Unsur yang ditekankan dalam struktur makro bersifat tematik, melihat tema-tema atau topik yang dikedepankan dalam suatu berita, atau gagasan inti, ringkasan, atau yang utama dari suatu teks. Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan oleh wartawan dalam pemberitaannya. Topik menunjukkan konsep dominan, sentral, dan paling penting dari isi suatu berita. Tema dan topik terealisasi pada *headline* sebuah berita sebagaimana disebutkan van Dijk (1988:248), "*The headlines define the overall coherence or semantic unity of discourse, and also what information readers memorize best from a news report*".

Karena topik disimpan pada bagian paling atas artikel, topik memiliki peran utama dalam mempengaruhi pembaca. Masih menurut van Dijk, topik dapat secara langsung dilihat dari judul atau *leads* dari suatu teks. Judul maupun *leads* secara langsung menyimpulkan isi dari keseluruhan teks. (van Dijk, 1993: 118).

Sebelum menganalisis artikel yang menjadi objek penelitian, penulis akan menjabarkan artikel tersebut per alinea.

Presiden Izinkan ENI Beroperasi di Ambalat

- (1) **JAKARTA, SENIN** - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan perusahaan minyak dan gas asal Italia, PT ENI E&P mengembangkan proyek migas di Ambalat, Bukat, dan sejumlah lahan di sekitarnya. Izin penambangan migas tersebut diberikan lantaran pemerintah merasa blok tersebut merupakan bagian wilayah kedaulatan NKRI.
- (2) "Tanggapan presiden itu dipersiapkan, karena kita membutuhkan peningkatan produksi minyak dan gas," jawab Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro mengenai rencana pengembangan proyek migas PT ENI E&P.
- (3) Rencana pengembangan proyek migas PT ENI E&P tersebut, menurut Purnomo sempat diutarakan petinggi PT ENI E&P saat bertemu dengan Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/10).
- (4) Paolo Scaroni (Chief Executif Officer/CEO ENI) yang membawa Stefano Lucchini (humas ENI), dan Roberto Lorato (Direktur Manejer ENI) di Indonesia serta Roberto Palmieri (Dubes Italia) membeberkan sejumlah temuan ladang minyak dan gas di Ambalat dan Bukat serta sekitarnya. "Beberapa cadangan gas yang kelihatan di situ, tadi ditunjukkan. Mereka mau kembangkan dan itu memang wilayah kedaulatan kita," ujarnya.
- (5) Di tengah-tengah temuan ladang migas itu, Purnomo mengatakan, kedatangan petinggi PT ENI E&P bertemu dengan Presiden Yudhoyono

juga mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia perihal polemik wilayah dengan pemerintah Malaysia.

- (6) "Ini masalahnya komitmen dari pemerintah karena wilayah itu pernah diklaim oleh Malaysia. Sekarang ini masuk ke daerah konflik, jadi mereka minta pada pimpinan nasional komitmennya, tidak hanya komitmen teknis, karena shell dan petronas juga akan masuk juga," ujarnya.
- (7) Di perairan laut Sulawesi di sebelah Timur Pulau Kalimantan terdapat KPS antara lain, Total Indonesia mengelola Blok Bunyu sejak 1967, BP mengelola lepas pantai North East Kalimantan tahun 1970, dan Hadson Bunyu untuk Blok Bunyu pada 1983. Kemudian, ENI Bukat untuk Blok Bukat tahun 1988 dan Eni Ambalat untuk Blok Ambalat pada 1999.
- (8) Namun mendadak, wilayah itu diklaim oleh Malaysia melalui peta 1979 yang diterbitkan secara sepihak. Malaysia bahkan menawarkan blok migas yang berada di dalam wilayah Indonesia tersebut kepada Shell.
- (9) Peta 1979 itu sudah diprotes Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Sejak tahun 1980, Pemerintah Indonesia terus menyampaikan protes secara berkala, karena Malaysia telah melanggar wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
- (10) Sesuai dengan hak kedaulatan terhadap wilayah tersebut, terbukti Indonesia telah banyak membuat kontrak-kontrak migas di wilayah itu tanpa gugatan dari pihak mana pun juga. Termasuk Malaysia, yang saat ini menawarkan blok migas yang berada di dalam wilayah Indonesia. Pihak Indonesia hingga saat ini menganggap pemberian konsesi kepada Shell merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
- (11) Lebih lanjut Purnomo mengemukakan, rencana investasi PT ENI E&P di blok Ambalat, Bukat dan sekitarnya dalam jumlah yang besar. Apalagi selepas pertemuan dengan SBY, PT ENI E&P bakal mengemukakan rencana pembangunannya di blok tersebut. "Yang kemudian bersama-sama menghitung dengan kita. Estimatnya cukup besar, mereka juga disana akan membangun LNG terminal floating," katanya seraya menegaskan, pembangunan LNG floating terminal biasanya memerlukan cadangan besar hampir sama dengan blok Masela.
- (12) "Untuk LNG terminal butuh sekitar 10 sampai 15 juta. Mereka melihat prospek menarik," katanya.
- (13) Namun demikian, Purnomo mengaku belum mengetahui berapa besar jumlah angka investasi yang akan ditanam pada proyek yang dibidik PT ENI E&P. "Nilai besarnya belum secara spesifik," tandasnya.
- (14) Selain mengembangkan proyek migas di perairan Kalimantan Timur, PT ENI E&P berencana mengembangkan proyek crude mining di Sumatera Utara. "Gasnya akan dipakai untuk suplai ke pabrik pupuk Iskandar Muda," demikian Purnomo. (<http://www.kompas.com> diakses pada tanggal 10 Oktober 2009)

Artikel ini memiliki judul "Presiden Izinkan ENI Beroperasi di Ambalat", pada artikel ini, topik global teks disebutkan pada *headline* "Presiden Izinkan ENI Beroperasi di Ambalat". Headline ini menjadi sebuah gagasan utama yang akan memaparkan inti dari kandungan artikel. Ada dua topik yang dikembangkan dalam berita tersebut, pertama sikap politik Indonesia terhadap Malaysia yang

secara sepihak telah memasukkan blok Ambalat ke dalam wilayahnya, sehingga terjadi perselisihan mengenai kawasan ini. Disinyalir Malaysia telah memberikan hak izin untuk mengelola kawasan yang kaya minyak ini kepada Shell dan Petronas Carigall. Kedua, Indonesia telah memberikan izin bagi PT ENI E&P, perusahaan minyak dan gas asal Italia untuk mengembangkan proyek migas di Ambalat. Izin ini diberikan, karena pemerintah Indonesia merasa blok tersebut merupakan bagian dari wilayah kedaulatan NKRI. Artikel ini menegaskan bahwa Indonesia mempunyai rencana untuk mengembangkan kawasan Ambalat, salah satunya dengan menggandeng perusahaan mitra untuk melakukan penambangan migas di kawasan tersebut. *Lead* artikel tersebut menyebutkan, “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan perusahaan minyak dan gas asal Italia, PT ENI E&P mengembangkan proyek migas di Ambalat, Bukat, dan sejumlah lahan di sekitarnya. Izin penambangan migas tersebut diberikan lantaran pemerintah merasa blok tersebut merupakan bagian wilayah kedaulatan NKRI”. Melalui *lead* ini dapat diketahui tentang informasi adanya kerjasama antara pemerintah Indonesia dan PT ENI, suatu perusahaan minyak dan gas asal Italia untuk melakukan penambangan migas di kawasan konflik Ambalat. Dalam artikel ini diketahui bahwa representasi pemerintah Indonesia ditampilkan di dalam *headline*. Dalam kasus ini Pemerintah Indonesia terus berupaya menunjukkan sikap politik tidak mau kompromi bila menyangkut kedaulatan Negara. Karena artikel ini didapat dari *Kompas online*, dimana tersedia forum untuk memberikan komentar terhadap artikel ini, terlihat bahwa semua komentar yang berasal dari Indonesia mendukung sikap pemerintah Indonesia tersebut.

- **Superstruktur: Skema**

Sementara itu, makna global yang direpresentasikan dalam topik, tentunya tersusun dengan baik dalam wacana. Hal ini merupakan skema atau superstruktur wacana. Wacana terbagi dalam kategori-kategori umum antara lain seperti “... *Summary (Headline + Lead), Main Event, Backgrounds (History + Context), Verbal Reactions and Comments (Evaluation + Expectations).*” (van Dijk, 1993: 119) walaupun informasi yang disusun dalam topik bisa disampaikan dalam format lain.

Dalam artikel ini, *lead* yang muncul merupakan penjelasan dari *headline* yang ditampilkan. Ada dua peristiwa yang terkait dalam berita ini. Pertama, sikap Indonesia terhadap kasus Ambalat yaitu akan terus mempertahankan kawasan Ambalat sebagai bagian dari wilayah NKRI, yang kedua perealisasi sikap tersebut ditunjukkan dengan memberikan izin bagi PT ENI untuk melakukan penambangan migas di kawasan Ambalat. Disebutkan pula mengenai alasan pengizinan penambangan tersebut, dikarenakan sebelumnya tidak ada gugatan dari pihak manapun terhadap kontrak-kontrak migas di wilayah itu, termasuk dari Malaysia, namun dengan tiba-tiba dan secara sepihak Malaysia mengklaim kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Komentar yang diberikan oleh pihak yang berwenang, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sangat mendukung isi dari berita ini secara keseluruhan. *Headline, lead, background, main event, dan comments* yang ditampilkan merupakan bagian-bagian yang

saling mendukung satu sama lain menjadi satu keutuhan berita Kesemuanya menunjukkan sikap Indonesia yang tidak akan berkompromi mengenai klaim Malaysia terhadap wilayah Ambalat karena menyangkut kedaulatan Negara. Sikap ini memberikan representasi yang sifatnya positif bagi pemerintah Indonesia.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema pemberitaan dari artikel tersebut

| Paragraf | Kategori Skema |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Headline</i> dan (1) | <i>Summary</i> |
| 2-6 | <i>Comments</i> |
| 7 | <i>Background</i> |
| 8-10 | <i>Main events</i> |
| 11-14 | <i>Comments</i> |

- **Struktur Mikro**

Struktur mikro adalah makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks. Pemakaian kata, kalimat, proposisi, retorika tertentu oleh media dipahami van Dijk sebagai bagian dari strategi media atau wartawan. Struktur wacana adalah cara yang efektif untuk melihat proses retorika dan persuasi yang dijalankan ketika seseorang menyampaikan pesan. Kata-kata tertentu mungkin dipilih untuk mempertegas pilihan dan sikap, membentuk kesadaran politik dan sebagainya.

Pada artikel ini yang menjadi perhatian adalah aspek sintaksis yang dapat diamati dari penonjolan aktor pada klausa aktif, tingkat kedetilan dari berita, dan pilihan kata.

1. **Aspek Sintaksis**

Aspek sintaksis dapat diamati dari bentuk kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif lebih menonjolkan *process* yang dilakukan *actor*, sedangkan pada kalimat pasif yang lebih ditonjolkan adalah apa yang terjadi pada *goal*. Penonjolan aktor pada klausa aktif dapat dilihat pada kalimat yang terdapat dalam paragraf pertama (1):

“JAKARTA, SENIN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan perusahaan minyak dan gas asal Italia, PT ENI E&P mengembangkan proyek migas di Ambalat, Bukit, dan sejumlah lahan di sekitarnya. Izin penambangan migas tersebut diberikan lantaran pemerintah merasa blok tersebut merupakan bagian wilayah kedaulatan NKRI.”

Pada kalimat tersebut, partisipan yang muncul adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai aktor dan PT ENI E&P sebagai goal, sementara kata mengizinkan merupakan proses. Halliday mengatakan bahwa dalam kalimat aktif yang mencakup aktor, akan muncul pertanyaan “What did the actor do?”, dalam paragraph ini pertanyaan yang muncul adalah “What did Presiden SBY do?”, sehingga penonjolan aktor yaitu Presiden SBY akan sangat terlihat. Penonjolan aktor yang ditampilkan dalam kalimat aktif, mampu menarik

perhatian pembaca mengenai proses yang dilakukan oleh aktor tersebut. Dapat saja kalimat tersebut diubah menjadi kalimat pasif, “Perusahaan minyak dan gas asal Italia, PT ENI E&P diizinkan mengembangkan proyek migas di Ambalat, Bukat dan sejumlah lahan lainnya.” Namun efek yang dihasilkan akan sangat berbeda bila berita tersebut ditampilkan dalam bentuk kalimat aktif. Dalam kalimat pasif ini yang menjadi pusat perhatian adalah PT ENI E&P, pembaca tidak akan bertanya lebih lanjut mengenai siapa yang memberikan izin. Sementara tujuan pemberitaan ingin menonjolkan sosok Presiden SBY yang telah memberikan izin bagi PT ENI E&P untuk melakukan penambangan migas di kawasan Ambalat.

2. Aspek Detil

Tingkat kedetilan dan kelengkapan (*Level of specificity and degree of completeness*) disebutkan oleh Eriyanto sebagai aspek “detil”, berhubungan dengan kontrol informasi suatu pihak yang ditampilkan dalam berita. Sebuah media dapat menampilkan suatu informasi lebih mendetil jika informasi tersebut menguntungkan citra mereka, dan sebaliknya, akan menampilkan detil informasi dalam jumlah sedikit atau bahkan tidak disampaikan sama sekali jika informasi tersebut merugikan bagi mereka. Van Dijk (1993b:275) menyatakan: “*One of the most conspicuous forms of over-completeness in discourse is the irrelevant negative categorization of participants in order to deligitimate or marginalize their opinions or actions.*”

Pada paragraf 4, disebutkan informasi yang detil mengenai siapa-siapa yang hadir mewakili PT ENI E&P dalam pertemuan dengan Presiden SBY, yaitu Paolo Scaroni (Chief Executif Officer/CEO ENI) yang membawa Stefano Lucchini (humas ENI), dan Roberto Lorato (Direktur Manejer ENI) di Indonesia serta Roberto Palmieri (Dubes Italia). Informasi detail ini menunjukkan keseriusan pihak PT ENI E&P dalam kerjasamanya dengan Indonesia untuk pengembangan kawasan Ambalat. Terlebih turut hadir dubes Italia untuk Indonesia semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Italia. Kerjasama ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengembangkan Sumber Daya Mineral di Ambalat, tanpa terpengaruh konflik mengenai wilayah tersebut dengan Malaysia. Berita tersebut memberikan representasi positif bagi Pemerintah Indonesia.

3. Aspek Pilihan Kata

Aspek pilihan kata ini memiliki fungsi dalam memberikan penilaian yang positif atau negatif sebagaimana disebutkan oleh van Dijk (1993b:264) bahwa yang dikaji dalam aspek ini adalah “*choice of words that imply negative (or positive) evaluations*”.

Pada paragraf pertama, dalam kalimat “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan perusahaan minyak dan gas asal Italia, ...” verba yang dipakai adalah **izinkan (mengizinkan/memberikan izin)**, kata ini dirasakan memiliki tingkat kesopanan dibandingkan kata sejenis yang memiliki makna

hampir sama, misalnya kata *memberikan wewenang, menginstruksikan*, hal ini memberikan indikasi keinginan untuk memperhalus atau mendinginkan suasana yang mungkin akan "panas" setelah berita ini diturunkan.

Pada paragraf 8, kata-kata **mendadak, diklaim sepihak**, memberikan efek tersendiri bagi pembaca. Kata **mendadak** dan **diklaim sepihak** dapat ditemui dalam kalimat "Namun mendadak, wilayah itu diklaim oleh Malaysia melalui peta 1979 yang diterbitkan secara sepihak". Kata **mendadak** dan **diklaim sepihak** seakan menunjukkan bahwa Malaysia dengan sangat tiba-tiba dan tidak mendasar menyatakan bahwa wilayah Ambalat adalah miliknya, sehingga menimbulkan efek "kebencian dan kegeraman" bagi para pembaca, khususnya masyarakat di Indonesia. Kata-kata ini menunjukkan konotasi negatif tentang Malaysia, sehingga secara implicit memberikan efek positif bagi Indonesia sebagai pihak yang "dicurangi"

F. Simpulan

Berdasarkan analisis pada tataran makro dan mikro yang menggunakan kerangka model analisis Teun A. van Dijk pada pemberitaan mengenai konflik Ambalat antara Indonesia dan Malaysia dalam *Kompas.com* ditarik simpulan bahwa representasi pemerintah Indonesia yang ditampilkan di dalam berita tersebut bersifat positif. Analisis tersebut tercakup dalam tataran makro yang melibatkan unsur kuasa dan kendali, dan tataran mikro. Tataran mikro mencakup level makro yang melihat topic wacana, superstruktur yang melibatkan skema wacana, dan level mikro yang menganalisis wacana dari aspek sintaksis, tingkat kedetilan, dan pilihan kata.

Bahan Rujukan:

Buku

Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.

Halliday, M. A. K. (1985). *An Introduction to Functional Grammar*. (1st, Ed.) London: Hodder Arnold

Artikel Jurnal

Hammersley, M. (1997). On The Foundations of Critical Discourse Analysis. *Language and Communication*, 17 (3), 237-248.

van Dijk, T. A. (2001). Critical Discourse Analysis. In D. Tannen, D. Schiffrin, & H. Hamilton, *Handbook of Discourse Analysis* (pp. 352-371). Oxford: Blackwell.

van Dijk, T. A. (1993). Discourse and Cognition in Society. In D. Crowley, & D. Mitchell, *Communication Theory Today* (pp. 107-126). Oxford: Pergamon Press.

van Dijk, T. A. (1996). Discourse, Power, and Access. In C. R. Caldas-Coulthard, & M. Coulthard, *Texts and Practices. Readings in Critical Discourse Analysis* (pp. 84-104). London: Routledge.

van Dijk, T. A. (2002). Policial Discourse and Political Cognition. In P. A. Chilton, & C. Schäffner, *Politics as Text and Talk. Analytical approaches to political discourse*. (Eds. ed., pp. 204-236). Amsterdam: Benjamins.

van Dijk, T. A. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. *Discourse & Society* , 249-283.

Van Dijk, T.A. (1995b.) Power and the news media. In D. Paletz (Ed.), *Political Communication and Action*. (pp. 9-36). Cresskill, NJ: Hampton Press.

Van Dijk, T.A. (1996.) Discourse, Power, and Access. In C. R. Caldas-oulthard, & M. Coulthard, *Texts and Practices. Readings in Critical Discourse Analysis* (pp. 84-104). London: Routledge.

Sumber Elektronik:

<http://www.utusan.com>

<http://www.tempointeractive.com>

<http://en.wikipedia.org/wiki/Ambalat>

<http://images.google.co.id>

<http://www.antara.co.id>

<http://www.suarapembaruan.com>

<http://www.utusan.com>

<http://www.kompas.com>

